



**Pengadilan Agama
Tulungagung Klas IA**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP TAHUN 2021

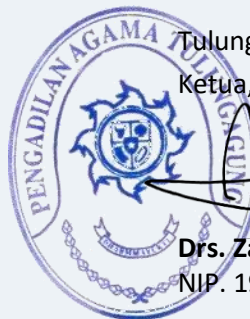
PERFORMANCE REPORT

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Tulungagung, 01 Februari 2022

Ketua,

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

NIP. 19690627 199403 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Tulungagung secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang di emban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Tulungagung ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja dalam penetapan kinerja tahun 2021 telah berhasil dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan nilai capaian yang sebagian besar telah memenuhi target yaitu :

1. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan (100%);
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (97,92%);
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (99,52%);
4. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama (93,50%);
5. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu (100%);
6. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (119,39%);
7. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu (94,44%);
8. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus (0%) ;
9. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan (100%);

10. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (79,37%);
11. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum (0%);
12. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) (100%);
13. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) (111,11%);
14. Persentase pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas (100%);
15. Persentase pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel (100%);
16. Persentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel (100%);
17. Persentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik (100%);
18. Persentase pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi yang efektif dan efisien (100%);
19. Persentase pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang transparan dan akuntabel (100%);
20. Presentase pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel (100%);
21. Persentase pelaksanaan Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel (100%).

Untuk rincian pencapaian kinerja pada masing-masing indikator dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	88,12%	97,92%
3	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK	100%	99,52%	99,52%
4	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	93,50%	93,50%
5	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
6	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	23,88%	119,39%
7	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara	100%	94,44%	94,44%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
		lengkap dan tepat waktu			
8	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95%	0%	0%
9	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
10	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%	71,43%	79,37%
11	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	0%	0%
12	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
13	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	90%	100%	111,11%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
14	Terwujudnya pengelolaan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas	100%	100%	100%
15	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	Persentase pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	100%
16	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	Persentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	100%
17	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya	Persentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif,	100%	100%	100%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
	manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	efisien dan akuntabel secara elektronik			
18	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	Persentase pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi yang efektif dan efisien	100%	100%	100%
19	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang pelaporan anggaran dan pelaporan kegiatan tahunan serta LKjIP yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
20	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi umum, sarana dan prasarana yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
21	Terwujudnya Rencana Aksi/ Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	21
B. Rencana Kinerja Tahunan 2021	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	37
B. Realisasi Anggaran	92
BAB IV PENUTUP	93
LAMPIRAN :	
- SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021;	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar SOP Pengadilan Agama Tulungagung	5
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	25
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	30
Tabel 2.3	Rincian Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2021	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gedung Kantor Pengadilan Agama Tulungagung	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung	17

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik (*feedback*) pada perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Tulungagung telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Tulungagung akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 1.1

Gedung Kantor Pengadilan Agama Tulungagung
Jl. Ir. Sukarno-Hatta No. 117 Tulungagung



B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), di Jawa Timur telah ada 36 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian sejak tanggal 1 Nopember 1996 bertambah satu Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. nomor 85 Tahun 1996. Sehingga seluruhnya berjumlah 37 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian;
- g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Tulungagung, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja*. Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas di bidang peradilan telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tabel 1.1
Daftar SOP Pengadilan Agama Tulungagung

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri Dari	Keterangan
I.	Teknis Pengadilan Tk.Pertama			
1.	Ketua	16	1. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung 2. SOP Penetapan Majelis Hakim 3. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi 4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain	1.SOP/AP/03 2.SOP/AP/06 3.SOP/AP/17 4.SOP/AP/18

			5. SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan saksi Dari Pengadilan Agama Lain	5. SOP/AP/19
			6. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	6. SOP/AP/21
			7. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain	7. SOP/AP/22
			8. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	8. SOP/AP/53
			9. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	9. SOP/AP/54
			10. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	10.SOP/AP/55
			11. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	11.SOP/AP/56
			12. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	12.SOP/AP/57

			13. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama Dengan Lelang 14. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain 15. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi 16. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah	13.SOP/AP/58 14.SOP/AP/60 15.SOP/AP/61 16.SOP/AP/62
2.	Wakil Ketua	9	1. SOP Manajemen Resiko Pengadilan Agama 2. SOP Pengendalian Dokumen 3. SOP Pengendalian Rekaman/ Arsip/Catatan Mutu 4. SOP Komunikasi 5. SOP Self Asestment 6. SOP Tinjauan Manajemen 7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai 8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat 9. SOP Tindakan Perbaikan	1.SOP/AM/01 2.SOP/AM/02 3.SOP/AM/03 4.SOP/AM/04 5.SOP/AM/05 6.SOP/AM/06 7.SOP/AM/07 8.SOP/AM/08 9.SOP/AM/09

3.	Hakim	6	1. SOP Penetapan Hari Sidang 2. SOP Pelayanan Mediasi 3. SOP Pelayanan Penundaan Sidang 4. SOP Pemeriksaan Setempat 5. SOP Pelayanan Ikrar Talak 6. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana	1. SOP/AP/09 2. SOP/AP/14 3. SOP/AP/16 4. SOP/AP/20 5. SOP/AP/33 6. SOP/AP/41
4.	Panitera	16	1. SOP Penunjukan Panitera Pengganti 2. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti 3. SOP Permohonan bantuan Panggilan/Pemberitahuan Ke Pengadilan Agama Lain 4. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar 5. SOP Prosedur Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar 6. SOP Pelayanan Sita Jaminan 7. SOP Pelayanan Sita Buntut	1. SOP/AP/07 2. SOP/AP/08 3. SOP/AP/11 4. SOP/AP/23 5. SOP/AP/24 6.SOP/AP/25 7.SOP/AP/26

			8. SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar 9. SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak 10. Sop Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan 11. Sop Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA 12. SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan 13. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain 14. SOP Pengelolaan ATK Perkara 15. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara 16. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	8. SOP/AP/29 9. SOP/AP/30 10.SOP/AP/34 11.SOP/AP/37 12.SOP/AP/38 13.SOP/AP/59 14.SOP/AP/69 15.SOP/AP/70 16.SOP/AP/71
5.	Panitera Muda Hukum	9	1. SOP Layanan Informasi 2. SOP Layanan POS Bantuan Hukum 3. SOP Penerimaan Perkara	1. SOP/AP/01 2. SOP/AP/02 3. SOP/AP/04

			4. SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara 5. SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah 6. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak 7. SOP Pengarsipan 8. SOP Pelaporan 9. SOP Pengaduan	4. SOP/AP/05 5.SOP/AP/31 6. SOP/AP/36 7. SOP/AP/63 8. SOP/AP/64 9. SOP/AP/65
6.	Panitera Muda Gugatan	18	1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap 2. SOP Pelayanan Penyerahan Akta Cerai 3. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak 4. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat 5. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak 6. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	1. SOP/AP/32 2. SOP/AP/35 3. SOP/AP/36 4. SOP/AP/39 5. SOP/AP/40 6. SOP/AP/42

			7. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara sederhana Dalam ekonomi syariah telah melewati batas waktu.	7. SOP/AP/43
			8. SOP Pelayanan Pengajuan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi batas waktu	8. SOP/AP/44
			9. SOP Pelayanan Banding	9. SOP/AP/45
			10. SOP Pelayanan Kasasi	10.SOP/AP/46
			11. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	11.SOP/AP/47
			12. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	12.SOP/AP/48
			13. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	13.SOP/AP/49
			14. SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	14.SOP/AP/50

			15. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding 16. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi 17. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI, POLRI 18. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	15.SOP/AP/51 16.SOP/AP/52 17.SOP/AP/66 18.SOP/AP/67
7.	Panitera Muda Permohonan	5	1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap 2. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak 3. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI 4. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus 5. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	1. SOP/AP/32 2. SOP/AP/36 3. SOP/AP/66 4. SOP/AP/67 5. SOP/AP/68
8.	Panitera Pengganti	1	1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	1. SOP/AP/13

9.	Jurusita/JSP	5	1. SOP Pemanggilan Para Pihak 2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain 3. SOP Pemanggilan Mediasi 4. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara 5. SOP Pelayanan Pemberitahuan isi putusan	1. SOP/AP/10 2. SOP/AP/12 3. SOP/AP/15 4. SOP/AP/27 5. SOP/AP/28
II.	Non Teknis			
1.	Sekretaris	3	1. SOP Pendelegasian Wewenang 2. SOP Pertanggung-jawaban Anggaran 3. SOP Penyusunan SAKIP	1. SOP/AS/13 2. SOP/AS/26 3. SOP/AS/30
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala	14	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab 2. SOP Pengembangan Pegawai 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar 4. SOP Pengelolaan Pegawai 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS	1. SOP/AS/01 2. SOP/AS/02 3. SOP/AS/03 4. SOP/AS/04 5. SOP/AS/05

			6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai 7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai 8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat 9. SOP Kenaikan Gaji Berkala 10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai 11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai 12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai 13. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai 14. SOP Pelaporan Harta kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	6. SOP/AS/06 7. SOP/AS/07 8. SOP/AS/08 9. SOP/AS/09 10.SOP/AS/10 11.SOP/AS/11 12.SOP/AS/12 13.SOP/AS/14 14.SOP/AS/15
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	10	1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas 2. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk dan Surat Keluar) 3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif 4. SOP Penatausahaan Aset 5. SOP Penatausahaan Persediaan 6. SOP Pemeliharaan Lingkungan Dan Keamanan	1. SOP/AS/16 2. SOP/AS/17 3. SOP/AS/18 4. SOP/AS/19 5. SOP/AS/20 6. SOP/AS/21

			7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 8. SOP Pengelolaan Perpustakaan 9. SOP Pencairan Anggaran 10. SOP Penatausahaan PNBP	7. SOP/AS/22 8. SOP/AS/24 9. SOP/AS/25 10. SOP/AS/27
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	5	1. SOP Pemberian Informasi 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 3. SOP Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran 4. SOP Penyusunan Laporan 5. SOP Pengelolaan TI	1. SOP/AS/23 2. SOP/AS/28 3. SOP/AS/29 4. SOP/AS/31 5. SOP/AS/32

Sebagai tolak ukur bagi personel peradilan juga dilakukan pengukuran tugas dan kinerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), mulai dari pimpinan sampai kepada staf. Hal itu semua akan menjadi arahan dan motivasi bagi segenap personel peradilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris.

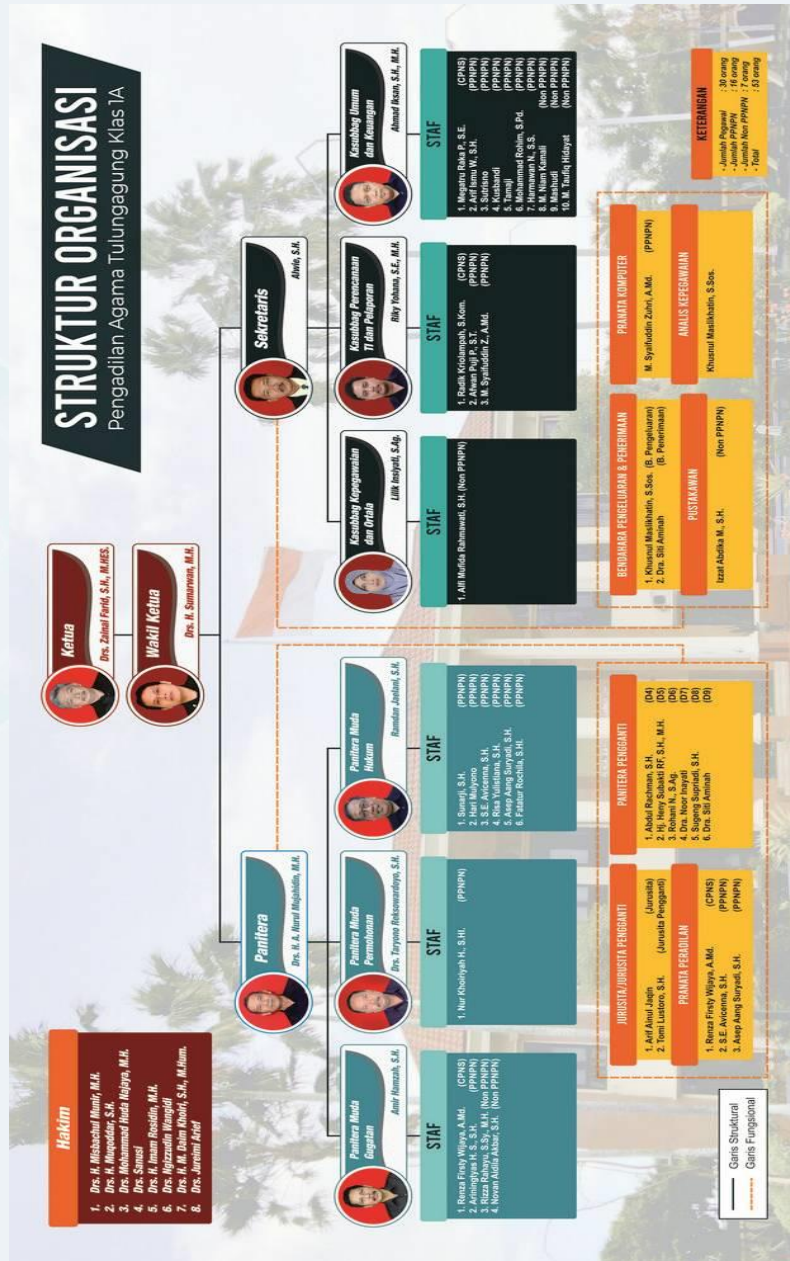
Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama.
3. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris, dimana Panitera bertugas dalam menjalankan tugas bidang kepaniteraan sedangkan Sekretaris bertugas dalam menjalankan tugas bidang Kesekretariatan.
4. Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum, serta dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.
5. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala sub bagian yaitu Kepala sub bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana, Kepala sub bagian Umum dan keuangan serta Kepala sub bagian Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Tulungagung sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 8 orang;
4. Panitera 1 orang;
5. Sekretaris 1 orang;
6. Panitera Muda 3 orang;
7. Panitera Pengganti 6 orang;
8. Kasubbag 3 orang;
9. Jurusta 1 orang
10. Jurusita Pengganti 1 orang
11. Analis Kepegawaian 1 orang
12. CPNS 3 orang
13. PPNP 16 orang

Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini membahas pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung selama tahun 2021. Capaian kinerja (*Performance Result*) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) yang ditargetkan untuk tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dari gambaran diatas maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung 2020 – 2024.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung 2020 – 2024 ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2020 – 2024 sebagaimana yang telah dituangkan dalam matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020 – 2024 pada Lampiran 2.

1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung”***.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.

3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Pengadilan Agama Tulungagung selalu menjunjung tinggi nilai- nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Integritas dan kejujuran.
- c. Akuntabilitas.
- d. Responsibilitas.
- e. Keterbukaan.
- f. Ketidak-berpihakan.
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Semua program tersebut harus dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Pengadilan Agama pada umumnya dan khususnya di Pengadilan Agama Tulungagung.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Meningkatkan pengelolaan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama.
6. Meningkatkan pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama.
7. Meningkatkan pemberian dukungan di bidang pelaporan anggaran dan pelaporan kegiatan tahunan serta LKjIP yang

transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama.

8. Meningkatkan pemberian dukungan di bidang administrasi umum, sarana dan prasarana yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama.
9. Meningkatnya Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2020–2024. Berdasarkan Tujuan Strategis tersebut di atas, Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan Indikator Kinerja menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Terwujudnya pengelolaan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama.
6. Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama.
7. Terwujudnya pemberian dukungan di bidang pelaporan anggaran dan pelaporan kegiatan tahunan serta LKjIP yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama.
8. Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi umum, sarana dan prasarana yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama.

9. Terwujudnya Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel.

3. PROGRAM UTAMA

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pada tahun 2021 telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI, sedangkan untuk Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama masih berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95%
3	Meningkatnya akses peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	90%
		c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi)	90%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Terwujudnya pengelolaan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas	100%
6	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	a. Persentase pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel	100%
		b. Persentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel	100%
		c. Persentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		d. Persentase pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi yang efektif dan efisien	100%
7	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang pelaporan anggaran dan pelaporan kegiatan tahunan serta LKjIP yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang transparan dan akuntabel	100%
8	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi umum, sarana dan prasarana yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel	100%
9	Terwujudnya Rencana Aksi/ Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tingkat pertama yaitu :

1. Perjanjian Kinerja Tingkat Pertama yang ditandatangani oleh Ketua Tingkat Pertama dengan Ketua Tingkat Banding.
2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Panitera dan Sekretaris) dengan Ketua Tingkat Pertama.
3. Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kasubag) dengan Eselon III (Sekretaris) dan Panitera Muda dengan Panitera.

Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdiri dari Pernyataan Penetapan Kinerja dan Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95%
3	Meningkatnya akses peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	90%
		c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di Eksekusi)	90%
5	Terwujudnya pengelolaan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas	100%
6	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	a. Persentase pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel	100%
		b. Persentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		c. Persentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik	100%
		d. Persentase pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi yang efektif dan efisien	100%
7	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang pelaporan anggaran dan pelaporan kegiatan tahunan serta LKjIP yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang transparan dan akuntabel	100%
8	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi umum, sarana dan prasarana yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Presentase pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
9	Terwujudnya Rencana Aksi/ Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel	100%

Dengan rincian anggaran kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Kegiatan TA. 2021

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara [20 perkara X Rp. 400.000,-]	Rp. 8.000.000
2	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang keliling (32 KEG)	Rp. 62.500.000
3	Jam layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama [999 JL X Rp. 100.000,-]	Rp. 99.900.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2021 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan	100%	100%	100%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	88,12%	97,92%
3	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK	100%	99,52%	99,52%
4	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	93,50%	93,50%
5	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
6	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	23,88%	119,39%
7	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	94,44%	94,44%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
8	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95%	0%	0%
9	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
10	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%	71,43%	79,37%
11	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	0%	0%
12	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
13	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Persentase putusan perkara perdata yang	90%	100%	111,11%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
	pengadilan	ditindaklanjuti (di eksekusi)			
14	Terwujudnya pengelolaan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas	100%	100%	100%
15	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	Persentase pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	100%
16	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	Persentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	100%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
17	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	Persentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik	100%	100%	100%
18	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan pengadilan Agama	Persentase pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi yang efektif dan efisien	100%	100%	100%
19	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang pelaporan anggaran dan pelaporan kegiatan tahunan serta LKjIP yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Persentase pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
20	Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi umum, sarana dan prasarana yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama	Presentase pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
21	Terwujudnya Rencana Aksi/ Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Adapun analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 1 : Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan	100	100	100	100	100

Sisa perkara Pengadilan Agama Tulungagung yang belum diputus tahun 2020 sebanyak 393 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2021 diputus sebanyak 393 perkara atau realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2020	Sisa Pkr Diputus Th.2021	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan tahun 2020	100%	393	393	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan sisa perkara yang belum diputus tahun 2019 sebanyak 441 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2020 diputus sebanyak 441 perkara atau realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2019	Sisa Pkr Diputus Th.2020	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan tahun 2020	100%	441	441	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian untuk sisa perkara yang belum diputus tahun 2018 sebanyak 548 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2019 diputus sebanyak 548 perkara atau realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2018	Sisa Pkr Diputus Th.2019	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019	100%	548	548	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Selanjutnya sisa perkara Pengadilan Agama Tulungagung yang belum diputus tahun 2017 sebanyak 668 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2018 diputus sebanyak 668 perkara atau realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2017	Sisa Pkr Diputus Th.2018	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2018	100%	668	668	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dan untuk sisa perkara Pengadilan Agama Tulungagung yang belum diputus tahun 2016 sebanyak 669 perkara dan sisa tersebut yang dapat diselesaikan/diputus tahun 2017 sebanyak 669 perkara atau realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2016	Sisa Pkr Diputus Th.2017	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017	100%	669	669	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Berdasarkan data tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2017 (100%) ke tahun 2018 (100%) tetap atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, dari tahun 2018 (100%) ke tahun 2019 (100%) juga tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, dari tahun 2019 (100%) ke tahun 2020 (100%) juga tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, serta dari tahun 2020 (100%) ke tahun 2021 (100%) juga tetap atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan di tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Oleh karena itu, untuk mempertahankan capaian kinerja penyelesaian sisa perkara yang telah dicapai yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Hakim dan Panitera Pengganti sehingga dalam melaksanakan proses persidangan dapat meminimalkan adanya kesalahan.
- b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.

2. SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 2 : Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
2	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	88,12	97,92	99,59	98,16

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 menerima perkara sejumlah 3.604 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2021 sejumlah 3.176 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2021 adalah sejumlah 428 perkara atau realisasi sebesar 88,12% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2021	Perkara Diputus Th.2021	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2021	90%	3.604	3.176	88,12%
2.	Capaian Kinerja				97,92%

Sedangkan pada tahun 2020 perkara yang diterima sejumlah 3.789 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2020 sejumlah 3.396 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2020 adalah sejumlah 393 perkara atau realisasi sebesar 89,63% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2020	Perkara Diputus Th.2020	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2020	90%	3.789	3.396	89,63%
2.	Capaian Kinerja				99,59%

Kemudian pada tahun 2019 perkara yang diterima sejumlah 3.783 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2019 sejumlah 3.342 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2019 adalah sejumlah 441 perkara atau realisasi sebesar 88,34% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2019	Perkara Diputus Th.2019	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2019	90%	3.783	3.342	88,34%
2.	Capaian Kinerja				98,16%

Sementara pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara sejumlah 3.395 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2018 sejumlah 2.847 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 adalah sejumlah 548 perkara atau realisasi sebesar 83,86% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2018	Perkara Diputus Th.2018	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2018	90%	3.395	2.847	83,86%
2.	Capaian Kinerja				93,18%

Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara sejumlah 3.525 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2017 sejumlah 2.857 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 adalah sejumlah 668 perkara atau realisasi sebesar 81,05% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2017	Perkara Diputus Th.2017	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2017	90%	3.525	2.857	81,05%
2.	Capaian Kinerja				90,06%

Melihat data penyelesaian perkara diatas, dapat digambarkan realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2017 (81,05%) ke tahun 2018 (83,86%) mengalami kenaikan sebesar 2,81%, dari tahun 2018 (83,86%) ke tahun 2019 (88,34%) mengalami kenaikan sebesar 4,48% dan dari tahun 2019 (88,34%) ke tahun 2020 (89,63%) mengalami kenaikan sebesar 1,29%. Sedangkan untuk realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2020 (89,63%) ke tahun 2021 (88,12%) mengalami penurunan sebesar 1,51%. Kemudian untuk data Capaian Kinerja selama 5 tahun terakhir yaitu untuk tahun

tahun 2017 (90,06%), tahun 2018 (93,18%), tahun 2019 (98,16%), tahun 2020 (99,59%), dan tahun 2021 (97,92).

Penyelesaian perkara dalam beberapa tahun terakhir ini telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya kenaikan pada prosentase realisasi penyelesaian perkara, hal ini dapat terwujud dikarenakan beberapa hal, antara lain :

- a. Peningkatan proses persidangan dengan menambah majelis hakim terlaksana dengan baik.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP terlaksana dengan baik meskipun dengan keterbatasan SDM dan bertambahnya volume perkara tiap tahun.
- c. Peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutsertakan pelatihan berjalan dengan baik.

3. SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 3 : Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
3	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	100	99,52	99,52	110,53	110,65

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 menyelesaikan sebanyak 3.569 perkara dan yang mengajukan upaya

hukum banding sebanyak 17 perkara, mengajukan kasasi sebanyak 6 perkara dan tidak ada pengajuan upaya PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.552 perkara atau 99,52%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2021	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	100%	3.569	3.552	99,52%
2.	Capaian Kinerja				99,52%

Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 3.837 perkara telah diselesaikan dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 20 perkara, mengajukan kasasi sebanyak 9 perkara dan tidak ada pengajuan upaya PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.817 perkara atau 99,48%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2020	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.837	3.817	99,48%
2.	Capaian Kinerja				110,53%

Kemudian pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung menyelesaikan sebanyak 3.890 perkara dan yang mengajukan upaya

hukum banding sebanyak 14 perkara, mengajukan kasasi sebanyak 2 perkara dan tidak ada pengajuan upaya PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.874 perkara atau 99,58%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2019	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.890	3.874	99,59%
2.	Capaian Kinerja				110,65%

Selanjutnya pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menyelesaikan sebanyak 3.515 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 10 perkara dan tidak ada pengajuan upaya kasasi maupun PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.505 perkara atau 99,72%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2018	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.515	3.505	99,72%
2.	Capaian Kinerja				110,80%

Dan untuk tahun 2017 perkara yang diselesaikan sebanyak 3.338 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 16 perkara dan kasasi sebanyak 5 perkara. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.317 perkara atau 99,37%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2017	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.338	3.317	99,37%
2.	Capaian Kinerja				110,41%

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum. Oleh karena itu Pengadilan Agama Tulungagung baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk lebih mempertahankan kualitas putusan yang dihasilkan, maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pembinaan untuk Hakim dalam hal meningkatkan pengetahuan hukum acaranya.
2. Pembinaan kepada Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
3. Optimalisasi penggunaan SIPP.

4. SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 4 : Index responden pencari kadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
4	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	93,50	93,50	187,98	178,71

Untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel perlu adanya umpan balik dari masyarakat pencari keadilan agar dapat diukur seberapa puas pencari keadilan terhadap pelayanan yang telah diterima.

Pada tahun 2021 semester II Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan survey terhadap 320 responden pencari keadilan dengan membagikan kuesioner yang berisi beberapa poin antara lain :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan;
2. Kemudahan prosedur pelayanan;
3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan;
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan;
5. Kesesuaian produk pelayanan;
6. Kompetensi/kemampuan petugas;
7. Perilaku petugas pelayanan;
8. Kualitas sarana dan prasarana;
9. Penangan pengaduan pengguna layanan.

Dari hasil pengisian kuesioner tersebut kemudian diinput ke dalam suatu aplikasi pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat dan didapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar “93,50” dengan nilai Mutu Pelayanan “A” dan predikat Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”. Untuk nilai capaian Indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2021	100	320	93,50	93,50
2.	Capaian Kinerja				93,50

Sedangkan untuk tahun 2020 semester II Pengadilan Agama Tulungagung juga melaksanakan survey terhadap 320 responden pencari keadilan dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang didapatkan sebesar “92,11” dengan nilai Mutu Pelayanan “A” dan predikat Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”. Untuk nilai capaian Indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2020	70	320	92,11	131,59
2.	Capaian Kinerja				187,98

Kemudian untuk tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan survey terhadap 346 responden pencari keadilan dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang didapat sebesar “87,57” dengan nilai Mutu Pelayanan “B” dan predikat Kinerja Unit Pelayanan “Baik”. Untuk nilai capaian Indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019	70	346	87,57	125,10
2.	Capaian Kinerja				178,71

Selanjutnya pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan survey terhadap 346 responden pencari keadilan. Dari jumlah tersebut sebesar 83% responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang telah diterima. Realisasi Kepuasan Masyarakat terhadap mutu pelayanan dan capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2018	70	346	83	118,57
2.	Capaian Kinerja				169,39

Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan survey terhadap 171 responden pencari keadilan. Dari jumlah tersebut sebanyak 154 responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang telah diterima atau sebesar 90,06% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2016 dan 2015 belum ditetapkan untuk indikator kinerja tersebut.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Responden	Jmlah Responden yang puas terhadap pelayanan	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2017	70%	171	154	90,06%
2.	Capaian Kinerja				128,65%

Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat maka Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah-langkah :

1. Melakukan pembinaan dan DDTK untuk petugas meja informasi dan pengaduan.
2. Meningkatkan proses pelayanan prima.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

5. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator 5 : Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2021	2021	2021	2020	2019

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
5	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

Dari perkara yang diputus pada tahun 2021 sebanyak 3.569 perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 3.569 perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2021	100%	3.569	3.569	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan dari perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 3.837 perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 3.837 perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2020	100%	3.837	3.837	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian pada tahun 2019 dari perkara yang diputus sebanyak 3.890 perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 3.890 perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2019	100%	3.890	3.890	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Selanjutnya pada tahun 2018 perkara yang diputus sebanyak **3.515** perkara, dan Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak **3.515** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2018	100%	3.515	3.515	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dan untuk tahun 2017 dari perkara yang diputus sebanyak **3.338** perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak **3.338** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2017	100%	3.338	3.338	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari hasil tersebut diatas, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/ penetapan kepada para pihak dengan baik dan telah memenuhi Capaian Kinerja sesuai target, yaitu 100%. Dan untuk mempertahankan hasil tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai/pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pengoptimalisasian penggunaan Aplikasi SIPP.

6. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator 6 : Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2021	Realisasi (%) 2021	Capaian (%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
6	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20	23,88	119,39	211,54	266,08

Dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2021 sebanyak **3.997** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk

melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 423 perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021	20%	423	101	23,88%
2.	Capaian Kinerja				119,39%

Sedangkan dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2020 sebanyak **3.789** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 364 perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020	10%	364	77	21,15%
2.	Capaian Kinerja				211,54%

Kemudian dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2019 sebanyak **3.783** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **451** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2019	10%	451	120	26,61%
2.	Capaian Kinerja				266,08%

Selanjutnya pada tahun 2018 perkara yang diterima dan disidangkan sebanyak **3.395** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **445** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2018	10%	445	64	14,38%
2.	Capaian Kinerja				143,82%

Sedangkan dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2017 sebanyak **2.857** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **408** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2017	10%	408	30	7,35%
2.	Capaian Kinerja				73,53%

Dari uraian diatas, prosentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2017 (7,35%) ke tahun 2018 (14,38%) menunjukkan kenaikan keberhasilan sebesar **7,03%**, untuk tahun 2018 (14,38%) ke tahun 2019 (26,61%) mengalami kenaikan keberhasilan sebesar **12,23%**, untuk tahun 2019 (26,61%) ke tahun 2020 (21,15%) mengalami penurunan keberhasilan sebesar **5,46%** dan untuk tahun 2020 (21,15%) ke tahun 2021 (23,88%) mengalami

kenaikan keberhasilan sebesar **2,73%**. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Tulungagung mulai memahami peranan penting dari mediasi dalam menyelesaikan kemelut rumah tangganya.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan mediasi tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah :

1. Pembinaan dan DDTK terhadap mediator.
2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator.
3. Optimalisasi penggunaan SIPP.

7. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja 7 : Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
7	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	94,44	94,44	99,14	125

Untuk mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara maka sangat penting untuk memperhatikan kelengkapan berkas perkara khususnya untuk perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dan diajukan secara tepat waktu.

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 terdapat berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yaitu sejumlah 36 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 34 berkas perkara telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 94,44%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2021	100%	36	34	94,44%
2.	Capaian Kinerja				94,44%

Sedangkan pada tahun 2020 terdapat berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yaitu sejumlah 29 perkara. Dari jumlah tersebut seluruhnya telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 79,31%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020	80%	29	23	79,31%
2.	Capaian Kinerja				99,14%

Kemudian pada tahun 2019 terdapat berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sejumlah 16 perkara. Dari jumlah tersebut seluruhnya telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2019	80%	16	16	100,00%
2.	Capaian Kinerja				125,00%

Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yaitu sejumlah 10 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 perkara telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018	80%	10	10	100,00%
2.	Capaian Kinerja				125,00%

Dan untuk tahun 2017 terdapat berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yaitu sejumlah 27 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 27 perkara telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2017	80%	27	27	100,00%
2.	Capaian Kinerja				125,00%

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung telah dapat memenuhi capaian kinerja sesuai target. Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja tersebut perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM melalui pembinaan dan DDTK terhadap hakim dan panitera pengganti.
2. Pengoptimalisasian penggunaan Aplikasi SIPP

8. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja 8 : Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2021	2021	2021	2020	2019

8	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0	100	0
---	---	-----	---	---	-----	---

Selama tahun 2021 di Pengadilan Agama Tulungagung belum ada perkara masuk yang menarik perhatian masyarakat khususnya ekonomi syari'ah sehingga di tahun tersebut belum ada realisasi terkait putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Sedangkan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara syari'ah sebanyak 3 perkara. Dari jumlah perkara tersebut telah diputus sebanyak 1 perkara dan putusannya telah dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus atau realisasi yang dicapai sebesar 100%

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah perkara Ekonomi Syari'ah yang diputus	Jumlah putusan perkara Ekonomi Syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Realisasi
1.	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) tahun 2020 yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	1	1	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

sementara untuk tahun 2018 dan 2019 di Pengadilan Agama Tulungagung belum ada perkara yang menarik perhatian masyarakat khususnya ekonomi syari'ah sehingga belum ada realisasi untuk indikator kinerja tersebut.

9. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja 9 : Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2021	Realisasi (%) 2021	Capaian (%) 2021	Capaian(%)	
					2020	2019
9	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 menerima perkara prodeo sebanyak 19 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020	100%	19	19	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara prodeo sebanyak 15 perkara. Dari jumlah tersebut juga telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara prodeo sebanyak 15 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2019	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Selanjutnya pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima dan menyelesaikan perkara prodeo sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018	100%	6	6	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dan untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung menerima dan menyelesaikan perkara prodeo sebanyak 1 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2017	100%	1	1	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian diatas, baik realisasi maupun capaian kinerjanya telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga apa yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508a/DJA/HK.00/III/2014 (pasal 5 ayat 2) telah dapat terpenuhi.

10. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja 10 : Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
10	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus	90	71,43	79,37	85,65	111,11

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 62.500.000,-** yang direalisasikan ke dalam 32 kegiatan sidang keliling. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2021	90%	231	165	71,43%
2.	Capaian Kinerja				79,37%

Dalam 32 kegiatan sidang keliling tersebut telah disidangkan sebanyak 231 perkara, dan sebanyak 165 perkara telah diputus yang terdiri dari perkara Cerai Talak 31 perkara, perkara Cerai Gugat 53 perkara dan perkara Dispensasi Kawin 81 perkara.

Sedangkan pada tahun 2020 anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 25.000.000,-** direalisasikan ke dalam 10 kegiatan sidang keliling dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2020	90%	48	37	77,08%
2.	Capaian Kinerja				85,65%

Dalam 10 kegiatan sidang keliling tersebut telah disidangkan sebanyak 48 perkara dan sebanyak 37 perkara telah diputus yang terdiri dari perkara Cerai Talak 11 perkara, perkara Cerai Gugat 24 perkara dan perkara Dispensasi Kawin 2 perkara.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 25.000.000,-** yang direalisasikan ke dalam 10 kegiatan sidang keliling. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2019	90%	39	39	100,00%
2.	Capaian Kinerja				111,11%

Dalam 10 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani 39 perkara untuk disidangkan yang terdiri dari perkara Cerai Talak 11 perkara, perkara Cerai Gugat 24 perkara, perkara Dispensasi Kawin 1 perkara, perkara Perubahan Nama 2 perkara dan Ijin Poligami 1 perkara. Dari 39 perkara tersebut seluruhnya telah diputus.

Untuk tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 30.000.000,-** yang direalisasikan ke dalam 18 kegiatan sidang keliling. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2018	90%	52	41	78,85%
2.	Capaian Kinerja				87,61%

Dalam 18 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani 52 perkara untuk disidangkan dan telah diputus sebanyak 41 perkara yang terdiri dari perkara Cerai Talak 9 perkara, perkara Cerai Gugat 20 perkara, perkara Dispensasi Kawin 8 perkara, perkara Perubahan Nama 2 perkara dan perkara Wali Adhol 2 perkara.

Kemudian Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2017 mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 30.000.000,-** untuk 20 kegiatan (per kegiatan Rp. 1.500.000,-) dan bisa dilaksanakan semuanya. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2017	90%	76	46	60,53%
2.	Capaian Kinerja				67,25%

Dalam 20 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani 76 perkara untuk disidangkan dan telah diputus sebanyak 46 perkara yang terdiri dari perkara Cerai Talak 16 perkara, perkara Cerai Gugat 19 perkara, perkara Dispensasi Kawin 9 perkara, perkara Perubahan Nama 2 dan perkara Cerai Talak 16 perkara.

11. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja 11 : Prosentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2021	Realisasi (%) 2021	Capaian (%) 2021	Capaian(%)	
					2020	2019
11	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan	100	0	0	100	100

Dalam tahun 2021 di Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada penerimaan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum. Hal ini seiring telah disosialisasikannya Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dimana pada pasal 38 ayat 1 dijelaskan bahwa “perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru”. Dengan terbitnya peraturan tersebut maka masyarakat dapat mengajukan permohonan perubahan identitas pada buku nikah langsung melalui Kantor Urusan Agama dan tidak lagi melalui Pengadilan Agama.

Sementara itu pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 96 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 96 perkara atau realisasi sebesar 100%

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2020	100%	96	96	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 533 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 533 perkara atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2019	100%	533	533	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 106 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 106 perkara atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2018	100%	106	106	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dan untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 90 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 90 perkara atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2017	100%	90	90	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

12. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja 12 : Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2021	Realisasi (%) 2021	Capaian (%) 2021	Capaian(%)	
					2020	2019

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
12	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 19 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2021	100%	19	19	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 15 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2020	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 15 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2019	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Selanjutnya pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 6 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2018	100%	6	6	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 1 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2017	100%	1	1	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Layanan bantuan hukum tersebut dalam hal ini dilayani oleh lembaga bantuan hukum BPKIH dari IAIN Tulungagung yang diakomodir dari dana DIPA 04 dan telah dapat terserap seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

13. SASARAN 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator 13 : Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2021	Realisasi (%) 2021	Capaian (%) 2021	Capaian (%)	
					2019	2018
13	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	90	100	111,11	111,11	0

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki perkara yang dimohonkan eksekusi di tahun 2019 dan 2020 sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut telah seluruhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam tahun 2021 atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan perkara dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2021	90%	6	6	100,00%
2.	Capaian Kinerja				111,11%

Sedangkan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung menerima permohonan eksekusi sebanyak 4 perkara dan semua perkara tersebut telah ditindaklanjuti :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan perkara dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2020	90%	4	4	100,00%
2.	Capaian Kinerja				111,11%

Kemudian pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung menerima permohonan eksekusi sebanyak 4 perkara dan semua perkara tersebut telah ditindaklanjuti :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan perkara dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2019	90%	4	4	100,00%
2.	Capaian Kinerja				111,11%

Selanjutnya untuk tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada permohonan eksekusi sehingga belum ada perkara eksekusi yang perlu ditindaklanjuti :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan perkara dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2018	90%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Dan untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 1 perkara dan belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses aanmaning. Oleh karenanya realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi pada tahun 2017 masih belum mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan perkara dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2017	90%	1	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan permohonan eksekusi mulai dari administrasi hingga pelaksanaan eksekusinya telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari terlaksananya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk mempertahankan hal tersebut maka perlu adanya pembinaan secara kontinyu terhadap jurusita/jurusita pengganti serta optimalisasi pelaksanaan SOP.

14. SASARAN 5 : Terwujudnya pengelolaan dukungan manajemen organisasi yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama

Indikator 14 : Prosentase pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
14	Prosentase pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas	100	100	100	0	0

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan berbagai kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja antara lain :

1. Mendesain dan menyusun rumusan program kerja yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra);
2. Melaksanakan penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2021;
3. Melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja untuk seluruh pegawai;
4. Menyusun rumusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
5. Melaksanakan pelantikan pegawai antara lain pelantikan Ketua, Wakil Ketua, Panitera Muda dan Penitera Pengganti;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat dinas, rapat terbatas kesekretariatan, dan rapat koordinator dengan efektif dan efisien;

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah kegiatan pengelolaan dukungan manajemen organisasi	Jumlah kegiatan pengelolaan dukungan manajemen organisasi yang dilaksanakan	Realisasi
1.	Realisasi pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas tahun 2021	100%	6	6	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

15. SASARAN 6 : Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama

Indikator 15 : Prosentase pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2021	Realisasi (%) 2021	Capaian (%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
15	Prosentase pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	0	0

Dalam indikator ini Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran antara lain berupa :

1. Penyusunan dan pengusulan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk tahun 2022;
2. Melaksanakan revisi DIPA tahun 2021 untuk optimalisasi penyerapan anggaran;
3. Melaksanakan penginputan realisasi anggaran pada aplikasi Smart-DJA;
4. Melaksanakan penginputan capaian output pada aplikasi SAS dan mengupload di aplikasi OM SPAN;
5. Melakukan update rencana penarikan dana pada halaman II DIPA melalui aplikasi SAKTI.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran yang dipenuhi	Realisasi
1.	Realisasi pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel tahun 2021	100%	2	2	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

16. SASARAN 6 : Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama

Indikator 16 : Prosentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2021	2021	2021	2020	2019

16	Prosentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel	100	100	100	0	0
----	---	-----	-----	-----	---	---

Dalam indikator ini Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2021 telah melaksanakan pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA yaitu penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan beserta data dukungnya setiap bulan selama 1 tahun, sehingga jumlah dokumen yang harus dikelola sebanyak 24 laporan.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah dokumen administrasi keuangan DIPA yang harus dikelola	Jumlah pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA yang telah dilaksanakan	Realisasi
1.	Realisasi pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel tahun 2021	100%	24	24	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

17. SASARAN 6 : Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama

Indikator 17 : Prosentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
17	Prosentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik	100	100	100	0	0

Dalam bidang kepegawaian, tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian secara elektronik yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung. Sedangkan jumlah data pegawai yang harus dikelola pada tahun 2021 adalah sebanyak 30 orang pegawai dan hingga saat ini seluruh data tersebut telah uptodate.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang harus dikelola secara elektronik	Jumlah pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian yang telah diupdate secara elektronik	Realisasi
1.	Realisasi pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik tahun 2021	100%	30	30	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

18. SASARAN 6 : Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi dan sumber daya manusia yang efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama

Indikator 18 : Prosentase pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi yang efektif dan efisien

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
18	Prosentase pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi yang efektif dan efisien	100	100	100	0	0

Dalam bidang Teknologi Informasi, Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hal pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi yaitu antara lain :

1. Pengelolaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
2. Pengelolaan aplikasi Antrian Sidang;
3. Pengelolaan aplikasi Drive Thru PATAS (Produk Akhir Tanpa Antri Suwe);
4. Pengelolaan aplikasi pendataan pengunjung Pengadilan Agama Tulungagung (Andung PATA)
5. Pengelolaan aplikasi PTSP Online;
6. Pengelolaan website Pengadilan Agama Tulungagung;
7. Pengelolaan media sosial Pengadilan Agama Tulungagung;
8. Pengelolaan aplikasi Buku Tamu Elektronik;
9. Pengelolaan audio informasi pencegahan korupsi, tata tertib persidangan dan protokol kesehatan;
10. Pengelolaan perangkat audio pelayanan;

11. Pengelolaan server dan jaringan;
12. Pengelolaan perangkat meeting media center.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah sistem informasi terintegrasi yang harus dikelola	Jumlah pengelolaan sistem informasi terintegrasi yang telah dilaksanakan	Realisasi
1.	Realisasi pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi yang efektif dan efisien tahun 2021	100%	12	12	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

19. SASARAN 7 : Terwujudnya pemberian dukungan di bidang pelaporan anggaran dan pelaporan kegiatan tahunan serta LKjIP yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama

Indikator 19 : Prosentase pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2021	Realisasi (%) 2021	Capaian (%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
19	Prosentase pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang transparan dan akuntabel	100	100	100	0	0

Dalam bidang pelaporan, Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 telah melaksanakan penyusunan pelaporan anggaran berupa laporan realisasi anggaran setiap bulan dalam 1 tahun anggaran, laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 serta laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sehingga jumlah dokumen yang dihasilkan adalah sebanyak 14 laporan.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang harus dikelola	Jumlah pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang diselesaikan	Realisasi
1.	Realisasi pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang transparan dan akuntabel tahun 2021	100%	14	14	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

20. SASARAN 8 : Terwujudnya pemberian dukungan di bidang administrasi umum, sarana dan prasarana yang transparan, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama

Indikator 20 : Prosentase pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2021	Realisasi (%) 2021	Capaian (%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
20	Prosentase pengelolaan sarana prasarana dan administrasi	100	100	100	0	0

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
	umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel					

Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel maka diperlukan adanya dukungan di bidang administrasi umum serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam bidang administrasi umum, Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi umum, antara lain :

1. Pengelolaan dokumen administrasi bidang umum;
2. Pengelolaan dokumen administrasi bidang keuangan;
3. Pengelolaan dokumen administrasi bida kepegawaian;
4. Pengelolaan dokumen administrasi bidang pelaporan;
5. Pengelolaan dokumen administrasi bidang Teknologi Informasi;
6. Pelaksanaan kegiatan belanja pegawai;
7. Pelaksanaan kegiatan belanja barang;
8. Pelaksanaan kegiatan belanja modal;
9. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan halaman;
10. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah dinas;
11. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas
12. Pelaksanaan kegiatan akreditasi penjaminan mutu

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang harus dikelola	Jumlah pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang diselesaikan	Realisasi
1.	Realisasi pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel tahun 2021	100%	12	12	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

21. SASARAN 9 : Terwujudnya rencana aksi/inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel

Indikator 21 : Prosentase pelaksanaan rencana aksi/inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2021	Realisasi (%) 2021	Capaian (%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
21	Prosentase Pelaksanaan Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja	100	100	100	0	0

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2021	2021	2021	2020	2019
	yang transparan dan akuntabel					

Dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu rencana aksi/inisiatif strategis dalam pelaksanaan bisnis proses Pengadilan Agama yang terdapat dalam anggaran DIPA dari Dirjen Badilag, antara lain yaitu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan kegiatan sidang keliling, dan terselenggaranya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat pencari keadilan yang terpinggirkan.

Untuk itu selain merencanakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas, juga diperlukan laporan-laporan atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan selama tahun 2021 telah disusun laporan untuk kegiatan tersebut setiap bulannya atau sebanyak 12 laporan.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah laporan pelaksanaan rencana aksi yang harus dipenuhi	Jumlah laporan pelaksanaan rencana aksi yang telah dipenuhi	Realisasi
1.	Realisasi pelaksanaan Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel tahun 2021	100%	12	12	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana dalam DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama) Tahun Anggaran 2021 serta perbandingan realisasi anggaran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Prosentase Realisasi
1.	2021	170.400.000	170.390.000	10.000	99,99%
Capaian Kinerja TA. 2021					99,99%
2.	2020	91.900.000	91.900.000	-	100,00%
Capaian Kinerja TA. 2020					100,00%
3.	2019	91.900.000	91.746.000	154.000	99,83%
Capaian Kinerja TA. 2019					99,83%
4.	2018	96.900.000	94.200.000	2.700.000	97,21%
Capaian Kinerja TA. 2018					97,21%
5.	2017	110.500.000	106.432.000	4.068.000	96,32%
Capaian Kinerja TA. 2017					96,32%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - 2.1. Sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan.
 - 2.2. Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
 - 2.3. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
 - 2.4. Perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun berjalan.
 - 2.5. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
 - 2.6. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).
 - 2.7. pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas.
 - 2.8. pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.
 - 2.9. pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel.
 - 2.10. pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik.
 - 2.11. pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi yang efektif dan efisien.

- 2.12. pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKjIP yang transparan dan akuntabel.
- 2.13. pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel.
- 2.14. pelaksanaan Rencana Aksi/Inisiatif Strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja yang transparan dan akuntabel

Keberhasilan tersebut dapat menjadi bahan acuan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2022.

- 3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai, antara lain :

- 3.1. Perkara tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu. Realisasi yang dicapai sebesar 88,12% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
(Hal ini dikarenakan banyaknya jenis perkara Ghaib sehingga proses persidangan membutuhkan waktu yang relatif lama).
- 3.2. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK. Realisasi yang dicapai sebesar 99,52 dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
- 3.3. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Realisasi yang dicapai sebesar 93,50 dari target yang ditetapkan sebesar 100%
- 3.4. Berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Realisasi yang dicapai sebesar 94,44% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

(Hal ini dikarenakan pada perkara kasasi salah satu berada di luar negeri sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk pembeitahuan terkait kelengkapan berkas perkara kasasi).

- 3.3. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Realisasi yang dicapai sebesar 71,43% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

(Hal ini dikarenakan kedua pihak hadir sehingga ada proses mediasi yang tentunya akan menambah agenda persidangan).

Tidak tercapainya target kinerja tersebut akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021.

B. REKOMENDASI

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK untuk para hakim dan panitera pengganti.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
4. Memberikan penghargaan (reward) bagi aparat Pengadilan Agama Tulungagung yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment) bagi aparat Pengadilan Agama Tulungagung yang melakukan pelanggaran.
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tulungagung.



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/5986/OT.01.2/SK/12/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung serta dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, sumber dana dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021;
- b. Bahwa dalam rangka menyusun laporan akuntabilitas yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tulungagung, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
6. Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
13. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan Rencana Program Kerja Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021;
- KEDUA : Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung;
- KETIGA : Surat Keputusan Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 28 Desember 2021



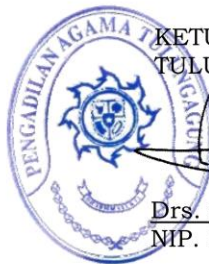
KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG,

Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199403 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG
NOMOR : W13-A11/5986/OT.01.2/SK/12/2021
TANGGAL : 28 DESEMBER 2021

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. NIP. 19690627 199403 1 005	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Misbachul Munir, M.H. NIP. 19570201 198203 1 004	Hakim	Ketua Tim
3.	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. NIP. 19670111 199103 1 001	Hakim	Penelaah IKU
4.	Drs. Sanusi NIP. 19641215 199303 1 003	Hakim	Penelaah RENSTRA
5.	Alwie, S.H. NIP. 19670228 199303 1 003	Sekretaris	Sekretaris Tim & Penyusun LKjIP
6.	Drs. H.A. Nurul Mujahidin, M.H. NIP.19640602 198903 1 002	Panitera	Koordinator Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
7.	Ramdan Jaelani, S.H. NIP. 19640210 198603 1 003	Panitera/ Panmud Hukum	Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
8.	Amir Hamzah, S.H. NIP. 19670601 199202 1 005	Panmud Gugatan	Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
9.	Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. NIP. 19650708 199303 1 003	Panmud Permohonan	Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
10.	Riky Yohana, S.E., M.H. NIP. 19810713 200604 1 011	Kasub Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Tim Penyaji & Pengolah Data Kesekretariatan
11.	Ahmad Iksan, S.H., M.H. NIP. 19861015 200604 1 004	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Tim Penyaji & Pengolah Data Kesekretariatan
12.	Lilik Insiyati, S. Ag. NIP. 19730505 200604 2 007	Kasub Bag. Kepegawaian dan Ortala	Tim Penyaji & Pengolah Data Kesekretariatan



**KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG,**

Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199403 1 005

